



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS SOSIAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HERI KARDONO**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **778702**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 640.550.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 178 m2/170 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 183 m2/70 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 340.550.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 387.000.000

1. MOTOR, HONDA NEW BEAT SPORTY CBS ISS H1B02N42L0 A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ MB / GE8 1.5 E AT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA REBORN Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 247.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 30.000.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 70.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.127.550.000

III. HUTANG Rp. 200.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 927.550.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS SOSIAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BUDIYANTO**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **735027**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **320.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 377 m2/208 m2 di KAB / KOTA
MAGELANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 320.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **193.500.000**

1. MOTOR, HONDA NF125SD Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp.
2.500.000
2. MOTOR, YAMAHA RX KING 135 CC Tahun 2001, HASIL SENDIRI
Rp. 15.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
16.000.000
4. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
160.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **41.700.000**

D. SURAT BERTHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **57.675.583**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **612.875.583**

III. HUTANG Rp. **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **612.875.583**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS SOSIAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : OKTARINA YULIASTANTI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 742063

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.625.000.000

1. Tanah Seluas 110 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/110 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 575.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 278 m2/278 m2 di KAB / KOTA DEMAK, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 171 m2/171 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 210.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
2. MOTOR, HONDA CRF Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 2.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 5.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.842.000.000

III. HUTANG Rp. 947.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.895.000.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS SOSIAL

I. DATA PRIBADI

- Nama** : WAHYUNINGSIH
- Jabatan** : KEPALA BIDANG
- NHK** : 760612

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 450.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 169 m2/120 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 60.000.000

- MOBIL, SUZUKI ST150-FUTURA Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
- MOTOR, HONDA SUPRA X 125/NF125 SD Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
- MOTOR, YAMAHA SE 88 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 353.684

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 510.353.684

III. HUTANG Rp. 34.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 476.353.684

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS SOSIAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : GALIH SULISTYO ARIWIBOWO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 799383

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 227 m2/100 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI , LAINNYA , Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 71.000.000

1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
2. MOBIL, SUZUKI AERIO Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. MOTOR, YAMAHA F1ZR Tahun 2001, WARISAN Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 10.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 581.000.000

III. HUTANG Rp. 50.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 531.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi



memenuhi kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS SOSIAL

I. DATA PRIBADI

- Nama** : ARIES SOEPRIHANTINI
- Jabatan** : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
- NHK** : 778257

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	250.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 317 m2/108 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	41.500.000
1. MOTOR, HONDA SUPRA FIT Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000		
2. MOBIL, TOYOTA MINIBUS AVANZA Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	10.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	6.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	307.500.000
III. HUTANG	Rp.	140.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	167.500.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS SOSIAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ROSEP LUBATIN
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3. NHK : 801840

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 250.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 324 m2/324 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 224.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR MATIC Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
4. MOBIL, TOYOTA AGYA MATIC Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERTAHAGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.756.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 477.756.000

III. HUTANG Rp. 98.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 379.756.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS SOSIAL

I. DATA PRIBADI

- Nama** : ERA KURNIA ROCHMAN
- Jabatan** : KEPALA UPTD RUMAH SINGGAH
- NHK** : 833782

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **447.500.000**

- Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/175 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, WARISAN Rp. 150.000.000
- Tanah Seluas 1 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 87.500.000
- Tanah Seluas 988 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **47.000.000**

- MOBIL, TOYOTA KIJANG STANDARD Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 38.000.000
- MOTOR, HONDA AT1121B01 A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **----**

D. SURAT BERTAHAGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **1.000.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **495.500.000**

III. HUTANG **Rp.** **70.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **425.500.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.